

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang membangun, memiliki banyak permasalahan yang dihadapi dalam melakukan pembangunan. Salah satu masalah tersebut adalah kecilnya modal yang dimiliki. Modal sebagai sumber pembiayaan pembangunan bisa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Krisis moneter dan krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997, berlanjut menjadi krisis multidimensi yang berdampak pada melemahnya perekonomian Indonesia dan masih harus menghadapi permasalahan yang mungkin juga dialami negara lain, khususnya negara sedang berkembang, yang sedang melaksanakan pembangunan. Pembangunan tersebut tentunya memerlukan dana dalam jumlah yang besar. Salah satu sumber pendanaan tersebut adalah kredit bank. Oleh karena itu sistem perkreditan yang merupakan jasa perbankan menjadi salah satu pilihan bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan finansialnya. Adapun jasa yang diberikan oleh perbankan adalah dengan memberikan fasilitas kredit, seperti kredit program pemerintah, kredit investasi, kredit konsumtif, kredit ekspor dan kredit modal kerja.

Pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergantung pada perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Ketika sektor perbankan terpuruk perekonomian nasional juga ikut terpuruk. Demikian pula

sebaliknya, ketika perekonomian mengalami stagnasi sektor perbankan juga terkena imbasnya dimana fungsi intermediasi tidak berjalan normal (Kiryanto, 2007:22).

Peranan penting perbankan sebagai salah satu fungsi intermediasi dalam fasilitas pemberian kredit dalam pembangunan ekonomi namun di sisi lain pemberian kredit perbankan juga mempunyai dampak moneter. Pemberian kredit perbankan yang dibiayai oleh bank sentral, baik dalam bentuk kredit likuiditas maupun kredit langsung, akan menambah jumlah uang primer (*reserve money*) dan memberikan dampak inflatoir. Berkaitan dengan hal itu, pemberian kredit perbankan yang sepenuhnya dibiayai dana masyarakat yang dihimpun melalui perbankan dan dipergunakan untuk kegiatan ekonomi yang produktif akan mendorong perekonomian tanpa menimbulkan dampak inflatoir. Untuk mengatasi dampak inflatoir dan pemberian kredit perbankan, sedapat mungkin kredit perbankan dibiayai dari pengerahan dana masyarakat (Bank Indonesia, 2007:11).

Studi-studi mengenai hubungan antara peran intermediasi keuangan dan pertumbuhan ekonomi telah dipelopori oleh Goldsmith (1969:39); Mckinnon (1973:23) dan Shaw (1973:11). Mereka menemukan bahwa akselerasi pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh struktur keuangan yang terorganisir. Mereka percaya bahwa pihak-pihak yang kelebihan dana (*surplus fund*) akan sangat membantu pihak-pihak yang kekurangan dana (*defisit fund*) apabila dapat dikelola secara efisien. Dalam pandangan mereka perbedaan kualitas dan kuantitas pelayanan yang diberikan oleh lembaga keuangan adalah strategi yang optimal untuk meningkatkan pertumbuhan *output* lebih cepat lagi dengan cara merangsang

keinginan menabung dan meningkatkan kualitas formasi modal (Ghafar, *et al*: 2003:34).

Meskipun penyaluran kredit memegang peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi negara, namun kredit yang disalurkan oleh perbankan belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari LDR (*Loan to Deposit Ratio*) Bank Umum periode 2005-2009 yang masih berkisar pada angka 59,66%-74,58% (Statistik Perbankan Indonesia), masih berada dibawah harapan Bank Indonesia. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, angka LDR seharusnya berada disekitar 85%-110% (Manurung, Rahardja, 2004:19).

Reformasi sektor keuangan, yang bertujuan untuk menggerakkan sektor riil melalui kredit modal kerja dan/atau kredit investasi bagi usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable*. Disisi lain Bank Indonesia berniat mengubah lagi aturan Giro Wajib Minimum (GWM). Perubahan ini memiliki salah satu tujuan, yaitu untuk mendorong penyaluran kredit perbankan. Dalam aturan yang berlaku, besarnya GWM untuk tiap bank sesuai dengan rasio penyaluran kredit terhadap Dana Pihak Ketiga (*Loan to Deposit Ratio*) bank (Kontan, 2010:1).

Menurut Warjiyo (2004:9) mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran uang secara implisit beranggapan bahwa semua dana yang dimobilisasi perbankan dari masyarakat dalam bentuk uang beredar dipergunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit perbankan. Dalam kenyataannya anggapan seperti itu tidak selamanya benar. Selain dana yang tersedia perilaku penawaran kredit perbankan juga dipengaruhi oleh persepsi bank terhadap

prospek usaha debitur dan kondisi perbankan itu sendiri seperti permodalan (CAR), jumlah kredit macet (NPL), dan LDR (*Loan to Deposit Ratio*). Menurut Retnadi (2006:12) kemampuan menyalurkan kredit oleh perbankan dipengaruhi oleh berbagai hal yang dapat ditinjau dari sisi internal dan eksternal bank. Dari sisi internal bank terutama dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam menghimpun dana masyarakat dan penetapan tingkat suku bunga. Dan dari sisi eksternal bank dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi ekonomi dan peraturan pemerintah.

Jumlah kredit pada suatu Bank dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi debitur maupun dari sisi kreditur perbankan itu sendiri. Jumlah kredit dari sisi debitur (dunia usaha) dipengaruhi oleh adanya peningkatan aktivitas usaha, baik dalam bentuk investasi maupun modal kerja. Jumlah kredit pada Bank Pemerintah di propinsi Sumatera Utara terus mengalami peningkatan, secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 1.1. Jumlah Kredit Tahun 2005-2009 pada Bank Pemerintah di Propinsi Sumatera Utara**

Tahun	Jumlah Kredit (Miliar Rp)	Pertumbuhan %
2005	130.133.17	-
2006	155.880.83	16.52
2007	188.043.49	17.10
2008	230.545.12	18.44
2009	277.091.82	16.80

Sumber: Bank Indonesia Medan, 2010

Tabel 1.1. di atas dapat diketahui bahwa jumlah kredit bank pemerintah di Propinsi Sumatera Utara menunjukkan tren yang terus meningkat. Jumlah kredit pada Bank Pemerintah di Propinsi Sumatera Utara meningkat dari Rp. 130.133.17 milyar

pada tahun 2005 menjadi Rp. 277.091.82 milyar pada tahun 2009. Jumlah kredit yang disalurkan bank di Propinsi Sumatera di dominasi oleh bank-bank pemerintah. Bank-bank pemerintah dalam kategori kepemilikan usaha yaitu; BUMN terdiri dari Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN) dan BUMD terus mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah kredit yang disalurkan oleh Bank Pemerintah di Propinsi Sumatera Utara pada tahun 2008-2009 hanya 16,89 %, hala ini belum seperti yang diharapkan, karena ketentuan Bank Indonesia, angka LDR seharusnya berada disekitar 85%-110% (Manurung, Rahardja, 2004:19).

Samuelson dan Nordhaus (2004:35), salah satu alasan permintaan kredit adalah permintaan transaksi, yaitu kebutuhan alat tukar yang diterima oleh umum untuk membeli barang dan membayar tagihan, dan sebagai tambahan, yaitu sebagai aset atau penyimpan nilai. Permintaan kredit tersebut dipengaruhi oleh suku bunga (biaya untuk memegang uang), dimana semakin tinggi biaya (suku bunga kredit) maka permintaan kredit (uang ) menurun.

Perkembangan tingkat suku bunga kredit pada bank Pemerintah di Propinsi Sumatera Utara :

**Tabel 1.2. Perkembangan Tingkat Bunga Kredit Bank Pemerintah Tahun 2005-2009**

Tahun	Tingkat Bunga Kredit
2005	12.71
2006	12.76
2007	11.83
2008	13.43
2009	12.37

Sumber: Bank Indonesia Medan, 2010

Tabel 1.2. di atas dapat diketahui bahwa perkembangan tingkat suku bunga kredit di Propinsi Sumatera Utara terus berubah dan fluktuatif pada periode 2005-2009 dengan tren yang menurun, kecuali pada tahun tahun 2008 suku bunga kredit mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Manurung dan Manurung (2009:33), mengungkapkan model keseimbangan bank di Indonesia didasarkan pada perilaku kredit dan deposit perbankan. Salah satu model kredit perbankan ditentukan oleh produk domestik regional bruto sesuai dengan ekspektasi teori.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat wilayah atau daerah didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB Propinsi Sumatera Tahun 2005-2009, sebagai berikut:

**Tabel 1.3. PDRB Propinsi Sumatera Utara atas Dasar Harga Konstan Tahun 2005-2009**

Tahun	PDRB (Miliar Rp)	Naik/Turun %
2005	113653.77	-
2006	138799.13	18.12
2007	157945.17	12.12
2008	181857.72	13.15
2009	209567.38	13.22

Sumber: Bank Indonesia Medan, 2010

Tabel 1.3. di atas dapat diketahui bahwa PDRB Propinsi Sumatera Utara berdasarkan harga konstan menunjukkan tren yang terus meningkat. PDRB Sumatera Utara meningkat dari Rp.113.653,77 milyar pada tahun 2005 menjadi Rp. 209.567,38 milyar pada tahun 2009.

Fisher (1989:43), mengemukakan secara makro ekonomi tingkat inflasi berpengaruh terhadap simpanan. Dengan adanya inflasi maka diasumsikan suku bunga akan mengalami kenaikan. Fisher mengatakan bahwa ada kaitan positif antara suku bunga dengan inflasi. Dengan suku bunga riil yang diperkirakan konstan dalam jangka panjang dan ekspektasi inflasi yang menyesuaikan diri terhadap laju inflasi yang berlaku.

**Tabel 1.4. Tingkat Inflasi di Propinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2009**

Tahun	Inflasi
2005	22.41
2006	6.11
2007	6.60
2008	10.72
2009	2.61

Sumber: Bank Indonesia Medan, 2010

Tabel 1.4. di atas dapat diketahui bahwa tingkat inflasi di Propinsi Sumatera Utara menunjukkan tren yang terus menurun. Tingkat inflasi di Sumatera Utara menurun dari 22,41 % pada tahun 2005 menjadi 2,61 % pada tahun 2009.

Ascarya (2002:28), dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, pemerintah bekerja sama dengan otoritas moneter mengeluarkan berbagai macam kebijakan. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter dalam hal ini adalah Bank Indonesia, dengan menggunakan instrumen Giro Wajib Minimum(GWM). Cadangan primer atau yang umum dikenal dengan giro wajib minimum adalah instrumen tidak langsung merupakan ketentuan dari Bank Sentral yang mewajibkan bank-bank memelihara sejumlah alat likuid sebesar presentase tertentu dari kewajiban lancarnya.

**Tabel 1.5. Jumlah Giro Wajib Minimum Perbankan di Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001-2009**

Tahun	Giro Wajib Minimum (Milyar Rp)	Naik/Turun %
2005	93,804	-
2006	117,924	20.45
2007	158,452	25.58
2008	78,405	(102.09)
2009	96,246	18.54

Sumber: Bank Indonesia Medan, 2010

Tabel 1.5. di atas dapat diketahui bahwa Giro Wajib Minimum di Propinsi Sumatera Utara menunjukkan tren menurun dan meningkat. Giro Wajib Minimum di Propinsi Sumatera Utara meningkat dari Rp. 93,804 milyar pada tahun 2005 menjadi Rp. 96,246 milyar pada tahun 2009.

Kotler (2000:31) menyatakan kualitas layanan merupakan suatu bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat layanan yang diterima (*perceived service*) dengan tingkat layanan yang diharapkan (*expected service*). Jumlah kantor cabang juga menjadi pertimbangan sendiri bagi masyarakat yang ingin menyimpan dan meminjam dananya di bank. Apalagi mobilitas masyarakat yang semakin cepat dan terus berkembang, mereka memerlukan jasa finansial yang mudah dan praktis.

**Tabel 1.6. Jumlah Kantor Bank Pemerintah di Propinsi Sumatera Utara Tahun 2005 - 2009**

Tahun	Kantor Bank	Naik/Turun %
2005	532	-
2006	624	14.74
2007	638	2.19
2008	660	3.33
2009	741	10.93

Sumber: Bank Indonesia Medan, 2010



Tabel 1.6. di atas dapat diketahui bahwa jumlah kantor Bank Pemerintah di Propinsi Sumatera Utara menunjukkan tren yang terus meningkat. Jumlah kantor Bank Pemerintah meningkat dari 532 unit kantor pada tahun 2005 menjadi 741 unit kantor pada tahun 2009.

Kredit mempunyai peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian. peran dan fungsi kredit secara garis besar di dalam perekonomian, keuangan dan perdagangan sebagai berikut: (1) kredit dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/uang, (2) kredit meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang, (3) kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, (4) kredit menimbulkan kegiairan berusaha masyarakat, (5) kredit sebagai alat stabilisasi ekonomi, (6) kredit sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional, (7) kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional (Rivai dan Veithzal, 2006:17).

Sehubungan dengan petingnya peranan kredit perbankan dalam perekonomian sebagai intermediasi dan transformasi aset serta terkait dengan perkembangan variabel makro ekonomi, maka perlu dilakukan suatu pengkajian ilmiah tentang kredit perbankan, khususnya pada bank pemerintah di Sumatera Utara,

### 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah penelitian ini adalah : apakah variabel-variabel makro ekonomi seperti Tingkat Suku Bunga (TSB), Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi (INF), Giro Wajib Minimum (GWM), dan Jumlah Kantor Bank (JKB) berpengaruh terhadap kredit pada Bank Pemerintah di Sumatera Utara.

### 1.3. Pembatasan Masalah

Penelitian ini hanya memfokuskan pada Bank Pemerintah di Sumatera Utara yang beroperasi tahun 2000 sampai dengan Agustus 2009. Kejadian sebelum dan setelah bulan penelitian tidak dimasukkan dalam laporan penelitian ini.

Mengingat luas cakupan variabel ekonomi makro dan jenis kredit perbankan perlu dilakukan pembatasan masalah agar analisis yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Pada penelitian ini analisis hanya dibatasi pada variabel makro ekonomi yang mempengaruhi kredit perbankan.

Faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi jumlah kredit pada Bank Pemerintah di Sumatera Utara tersebut dibatasi pada variabel makro ekonomi, yaitu Tingkat Suku Bunga (TSB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi (INF), Giro Wajib Minimum (GWM), dan Jumlah Kantor Bank (JKB).

### 1.4. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kredit pada bank Pemerintah di Sumatera Utara sebagai investor secara terperinci. Perumusan masalah dirumuskan sebagai berikut:

- Bagaimana pengaruh variabel-variabel makro ekonomi seperti Tingkat Suku Bunga (TSB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi (INF), Giro Wajib Minimum (GWM), dan Jumlah Kantor Bank (JKB) terhadap jumlah kredit pada bank pemerintah di Sumatera Utara dan variabel makro ekonomi mana yang

paling dominan berpengaruh terhadap jumlah kredit pada bank Pemerintah di Sumatera Utara ?.

#### 1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :

- Mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel makro ekonomi seperti Tingkat Suku Bunga (TSB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi (INF), Giro Wajib Minimum (GWM), dan Jumlah Kantor Bank (JKB) terhadap jumlah kredit perbankan pada Bank pemerintah di Sumatera Utara dan mengetahui variabel makro ekonomi yang paling dominan pengaruhnya terhadap jumlah kredit pada bank Pemerintah di Sumatera Utara.

#### 1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat :

1. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi manajemen bank-bank pemerintah dalam pengambilan keputusan untuk merealisasikan kredit perbankan.
2. Sebagai informasi ilmiah dan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang makro dan mikro ekonomi serta kaitannya dengan kredit perbankan.
3. Sebagai referensi bagi peneliti lainnya yang berminat dalam mengkaji bidang yang relevan dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda.